

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.
- Alfitra, **Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia**, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, **Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- , **Kamus Hukum**, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Anthon F. Susanto, **Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Azis Syamsudin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Bambang Waluyo, **Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Budiman Slamet, **Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Audit Investigatif**, Widyaiswara Madya, Pusdiklatwas BPKP, 2013.
- Darwan Prinst, **Hukum Acara Pidana Dalam Praktik**, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Dennis, Ian, *the Law Evidence*, Edisi Ke-3, Sweet and Maxwell, London, 2007.
- Dian Puji N. Simatupang, **Determinasi Kebijakan Anggaran Negara**, Papas Sinar Sianti, Jakarta, 2005.
- Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Penerbit Erlangga, Jakarta Timur, 2012.
- Emerson Yuntho, **Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tipikor**, ICW, Jakarta, 2014.

- Ermansyah Djaja, **Memberantas Korupsi Bersama KPK**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H. Anshoruddin, **Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- H. S. Munawir, **Auditing Modern**, Buku I Cet. IV, Yogyakarta, 1999.
- Hernold Ferry Makawimbang, **Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi**, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- , **Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang**, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.
- I. G. M. Nurdjana, **Korupsi dalam Praktik Bisnis, Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Ikhwan Fakhrojih, **Menggugat Peran DPR dan BPK dalam Reformasi Keuangan Negara**, In-TRANS Publishing, Malang, 2008.
- Jawade Hafidz Arsyad, **Korupsi dalam Perspektif HAN**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005.
- Pusat Bahasa Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, **Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984.
- Masruchin Ruba'I, dkk, **Buku Ajar Hukum Pidana**, Bayumedia Publishing, Malang, 2014.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Muhammad Djafar Saidi, **Hukum Keuangan Negara**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- P.A.F. Lamintang, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- R. Subekti, **Hukum Pembuktian**, Cetakan Ke-17, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Ridwan H.R, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Robert Klitgaard, **Membasmi Korupsi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Suhendar, **Konsep Kerugian Keuangan Negara**, Setara Press, Malang, 2015.
- Soedirjo, **Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana**, Jakarta, CV Akademika Pressindo, 1985, bandingkan dengan Lilik Mulyadi, **Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, Bandung, Alumni, 2007.
- Supriyadi Widodo Eddyono, **Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2006.
- Suyatno, **Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Teguh Prastyo, **Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Sumur Bandung, Bandung, 1983.

Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari KKN, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4607.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074.

Skripsi

Amrizal Denny Junaidi, **Implikasi Yuridis Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

Chandra Ayu Astuti, **Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi**, Skripsi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2015.

Eddy Mulyadi Soepardi, **Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, 2009.

Internet

Fayusman Rifai, 2011, **Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi** (*online*),
[Http://Fayusman-Rifai.Blogspot.Sg/2011/02/Bentuk-Bentuk-Tindak-Pidana-Korupsi.Html](http://Fayusman-Rifai.Blogspot.Sg/2011/02/Bentuk-Bentuk-Tindak-Pidana-Korupsi.Html), (20 Desember 2017).